

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar (daya) yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah mesyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang kemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice*(KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan sikap-sikap perilaku sadar dan kecakapan keterampilan yang baik.¹

Memberdayakan orang berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang memengaruhi pekerjaan mereka. Dengan demikian, berarti memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan gagasan baik dan mempunyai keterampilan

¹Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 77

mewujudkan gagasannya menjadi realitas. Pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan di mana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi.²

Bagi masyarakat menerima peran dan posisi yang demikian ideal di bidang pemerintahan dan pembangunan bukanlah pekerjaan sederhana. Posisi sebagai mitra yang berimbang hanya dapat terwujud dengan melalui proses pembenahan di segala segi, termasuk konsekuensi untuk memberdayakan masyarakat sipil. Oleh karena itu langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pemberdayaan yang tepat kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah dan lembaga-lembaga yang menjadi pendukung atas penyelenggaraan pembangunan. Sebelumnya perlu ditelusuri terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat.³

Makna “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan menunjukkan pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/

² Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta:PT Grafindo Persada) hal. 349

³ *Ibid.*, hal. 77

ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan/ kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan. Misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain. senada dengan pengertian inipriyono dan pranarka menyatakan bahwa; pemberdayaan mengandung dua arti: pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enabl*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberadaanya serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.⁴

Pada hakikatnya pemberayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang menungkinkan potensi masyarakat berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari, atau daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali, dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini yang berkurang, maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang

⁴ *Ibid.*, hal. 79

dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Disamping itu pemberdayaan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan, pemberdayaan sebaiknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah:

- a. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu secara mandiri.
- b. Sedangkan pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat mampu mandiri.⁵

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan elemen vital dalam lingkungan bisnis modern. Dengan pemberdayaan, bisnis menjadi lebih dekat dengan pelanggan, dapat memperbaiki pelayanan pengiriman barang, meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya memenangkan kompetisi. Hal tersebut tidak mungkin terjadi sampai organisasi menemukan cara memberdayakan orangnya. Pertama adalah karena lingkungan eksternal telah berubah sehingga mengalihkan cara bekerja dengan orang di dalam organisasi bisnis. Terdapat empat faktor yang menyebabkan yaitu;

- a. Semakin intensifnya kompetisi sehingga organisasi perlu memberdayakan orang melawan tantangan kompetisi.

⁵ *Ibid.*, hal. 79

- b. Inovasi teknologi berubah cepat sehingga organisasi perlu memberdayakan orang lain untuk menggunakan sebaik mungkin teknologi maju.
- c. Permintaan yang tetap atas kualitas yang lebih tinggi dan nilai yang lebih baik menyebabkan organisasi perlu memberdayakan orang untuk menemukan cara inovasi guna memperbaiki produk dan jasa. Timbulnya masalah ekologi menuntut organisasi perlu memberdayakan orang untuk melaksanakan kebijakan ekologi.

Kedua adalah cara orangnya sendiri berubah. Sejak lama manajer memandang orang sebagai sumber daya yang paling berharga. Akhirnya, keamanan dan sukses ke depan suatu organisasi lebih tergantung pada nakat dan kecerdasan orangnya daripada faktor tanah, bangunan, pabrik dan mesin.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konoatif, spikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, spikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

Terjadinya keberadaan pada empat aspek tersebut akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan-kecakapan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar tersebut masyarakat harus menjalani proses belajar. Dengan proses belajar tersebut akan diperoleh kemampuan/daya dari waktu ke waktu. Dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai, untuk mengantarkan kemandirian mereka.⁶

⁶ *Ibid.*, hal. 80

3. Manfaat Pemberdayaan

Apabila suatu organisasi menjalankan pemberdayaan, dikalangan anggota organisasi akan tumbuh perasaan menjadi bagian dari kelompok. Tumbuh perasaan puas dalam mengambil tanggungjawab untuk menjalankan tugasnya. Terdapat perasaan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang berharga dan memperoleh kesenangan dalam melakukan komunikasi dan kerja sama dengan orang lain. dengan demikian, pemberdayaan meningkatkan percaya diri dalam melakukan sesuatu, yang pada waktu sebelumnya tidak pernah percaya, mungkin silakukan. Akibatnya akan terjadi peningkatan kepuasan kerja.⁷

4. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat

Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap tranformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga mengambil peran di dalam pembangunan.

⁷Sutarjan. *Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. (Yogyakarta: Aditya Media. 2003). hal. 49

c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuknya inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap pertama atau tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan efektifnya untuk mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Sentuhan akan rasa ini akan membawa kesadaran masyarakat bertumbuh, kemudian merangsang semangat kebangkitan mereka untuk meningkatkan kemampuan diri dan lingkungan. Dengan demikian masyarakat semakin terbuka dan merasa membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk memperbaiki kondisi. Pada tahap kedua yaitu proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung naik, penuh semangat dan berjalan efektif, jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan-keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka

butuhkan. Pada tahap I masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.

Tahap ketiga adalah merupakan tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan, supaya mereka dapat membentuk kemampuan kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungan. Apabila masyarakat telah tercapai tahap ketiga ini maka masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan. Dalam konsep pembangunan masyarakat pada kondisi seperti ini seringkali didudukan sebagai subyek pembangunan atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator.⁸

5. Pola-pola Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, inilah yang membedakan partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat. Perlu difikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun dengan ini *good governance* yang telah di elu-elukan

⁸ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hal. 82

sebagai suatu yang paling relevan, baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembnagunan.⁹

B. Nelayan

1. Pengertian Nelayan

Dalam kamus besar Indonesia, pengertian nelayan adalah orang yang mata pencaharian utama dan usahanya menangkap ikan di laut. Di indonesia nelayan biasa bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir. Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut:

- a. Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah orang-orang yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau yang menjadikan perikanan sebagai mata pencahariannya.
- b. Dari segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan otong royong dan tolong menolong terasa penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengarahan tenaga yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa.
- c. Dari segi keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya nelayan hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan yang bersangkutan bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diturunkan oleh orang tua bukan yang dipelajari secara profesional.

⁹Anisa Hartiwi Wulandari, Jurnal”Strategi Prnggunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:,(Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2010), hal. 37

Nelayan merupakan komunitas masyarakat yang kehidupannya tergantung pada hasil laut, baik dari siklus kerjanya maupun dari cara mencari nafkah. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, perikanan masyarakat nelayan adalah masyarakat yang memiliki pencaharian sebagai pengangkap ikan. Karena bekerja sebagai pengkap ikan, maka tingkat kesejahteraan nelayan ditentukan oleh jumlah dan kualitas hasil tangkapan.

Nelayan termasuk ke dalam golongan masyarakat pesisir yang dapat dianggap paling banyak memanfaatkan hasil laut, potensi lingkungan perairan serta pesisir untuk kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Masyarakat nelayan umumnya bermukim secara tetap di daerah-daerah yang mudah mengalami kontak-kontak dengan masyarakat-masyarakat lain. Sistem ekonomi mereka tidak dapat lagi dikategorikan masih berada pada tingkat subsistem, sebaliknya sudah masuk ke sistem perdagangan karena hasil laut yang mereka peroleh tidak dikonsumsi sendiri, akan tetapi didistribusikan dengan imbal ekonomi kepada pihak-pihak lain.

Dasarnya masyarakat nelayan digolongkan menjadi dua lapisan, yaitu lapisan pertama merupakan lapisan masyarakat atas yang menguasai alat-alat produksi perikanan yang biasanya ditempati oleh majikan-majikan pemilik perahu dan alat-alat produksi perikanan lainnya. Lapisan kedua merupakan lapisan bawah yang ditempati oleh kalangan buruh

nelayan yang tidak mempunyai peralatan produksi dan bekerja pada majikan-majikan tersebut.

Berkaitan dengan hasil ikan yang didapatkan, masyarakat nelayan pada umumnya menerapkan sistem bagi hasil yaitu sistem yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pola pendapatan hasil ikan nelayan tidak menentu dan tidak dapat diduga sebelumnya.terkadang memperoleh ikan yang banyak, dilain waktu tidak memperoleh ikan samaa sekali. Dengan demikian, sistem bagi hasil dianggap sebagai sistem yang paling adil.¹⁰

2. Karakteristik nelayan

Karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam menyakini, bertindak, ataupun merasakan. Berbagai teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk menjelaskan berbagai kunci karakteristik manusia.karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani karena perbedaan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat petani menghadapi sumberdaya yang terkontrol yakni lahan untuk memproduksi suatu jenis komoditas dengan hasil yang dapat diprediksi. Dengan sifat yang demikian memungkinkannya lokasi produksi yang menetap, sehingga mobilitas usaha yang relatif rendah dan faktor resiko yang relatif kecil.¹¹

3. Klasifikasi nelayan berdasarkan kelompok kerja yaitu:

a. Nelayan perorangan

¹⁰ Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern*, (Malang: UB Press,2018), hal. 20

¹¹ Dalam jurnal. Erlin Hudjuala. “ Penilaian Nelayan terhadap Program Pengembangan Perikanan Tangkap Puse Seine di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara” <http://repository.usu.ac.id> diakses pada tanggal 22 juli 2019

Nelayan perorangan merupakan nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan sendiri dalam pengorganisasiannya tidak melibatkan orang lain.

b. Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Nelayan KUB merupakan gabungan dari minimal 10 orang nelayan yang kegiatan usahanya terorganisir dan tergolong dalam kelompok usaha bernama non-badan hukum.

c. Nelayan perusahaan

Nelayan perusahaan merupakan nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang terkait dengan perjanjian kerja kelautan dengan usaha perikanan.

Pada daerah penelitian, sebagian besar merupakan nelayan kecil, perikanan tangkap skala kecil dapat diklasifikasikan ke dalam kondisi/karakter usaha dimana nelayan sebagai operator usahanya. Dengan kata lain operator usaha perikanan tangkap skala kecil diklasifikasikan sebagai nelayan kecil. Nelayan kecil menurut UU No.45 Tahun 2009 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar lima *gross ton* (GT).

Perikanan tangkap skala kecil dalam sembiring adalah antaranya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kegiatan dilakukan dengan unit peningkatan skala kecil, kadang-kadang menggunakan perahu bermesin atau tidak sama sekali.

- b. Aktivitas penangkapan merupakan paruh waktu, dan pendapatan keluarga adakalanya ditambah dari pendapatan lain dari kegiatan di luar penangkapan.
- c. Kapal dsan alat tangkap biasanya dioperasikan sendiri.
- d. Alat tangkap dibuat sendiri dan dioperasikan tanpa bantuan mesin.
- e. Investasi rendah dengan modal pinjaman dari penampung hasil sampai sangat rendah.
- f. Hasil tangkapan per unit usaha dan produktivitas pada level sedang sampai sangat rendah.
- g. Hasil tangkapan tidak dijual kepada pasar besar yang terorganisir dengan baik tapi diedarkan di tempat-tempat pendaratan atau dijual di laut.
- h. Sebagian atau keseluruhan hasil tangkapan dikonsumsi sendiri bersama keluarganya.
- i. Komunitas nelayan kecil seringkali terisolasi baik secara Ogeografis maupun sosial dengan standar hidup keluarga nelayan yang rendah sampai batas minimal.¹²

C. Pelatihan

1. Pengertian Pelatihan

Dalam pandangan manajemen modern sekarang ini, manusia tidak lagi hanya diposisikan sekedar sebagai sumber daya utama organisasi, tetapi sudah lebih dari itu, yakni bahwa manusia itu sudah menjadi aset

¹² Wahyu Wulandari, 2016, “ *Kajian Tingkat Kesejahteraan Nelayan Kecil di Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap* ”, Skripsi Jurusan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, <http://repository.ump.ac.id> diakses pada tanggal 22 juli 2019

organisasi di masa depan atau yang lebih populer dikenal dengan konsep *human capital*. Apabila organisasi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, berkualitas, berkomitmen, dan berintegritas yang baik dipastikan organisasi tersebut dapat berkembang dengan pesat.

Investasi pada SDM berupa pengorbanan sejumlah data yang dikeluarkan dan kesempatan memperoleh penghasilan selama proses investasi. Pada dasarnya, pelatihan adalah suatu aktivitas untuk meningkatkan kemampuan dengan mengalokasikan anggaran sebagai investasi. Hal yang searah dirumuskan bahwa pelatihan pada intinya adalah sebuah proses belajar. Oleh karena itu, pelatihan didefinisikan sebagai suatu proses mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan pegawai baru untuk melakukan pekerjaannya. Sesungguhnya, pelatihan bukan hanya dikhususkan untuk pegawai yang baru saja melainkan juga pegawai lama yang akan dipromosikan ke posisi tertentu.

Untuk memperkaya pemahaman para pembaca tentang konsep pelatihan berikut ini beberapa konsep pelatihan yang dikemukakan para ahli.

1. Menurut Rivai dan Sagala, pelatihan adalah proses yang sistematis mengubah tingkat laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi, yang berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Menurut Simamora, pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kualitas, keahlian, pengetahuan, pengalaman ataupun perubahan sikap seseorang.
3. Menurut Sonny Sumarsono, pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan SDM. Pendidikan dan latihan tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan keterampilan bekerja sehingga meningkatkan produktivitas kerja.
4. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan pertahankannya SDM yang kompeten.

Untuk melengkapi berbagai konsep di atas, dikemukakan tiga konsep yang dikemukakan pakar manajemen dalam skop internasional berikut ini.

1. Pelatihan dimaknai sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Pelatihan adalah suatu proses yang sistematis untuk mengembangkan keterampilan individu, kemampuan, pengetahuan atau sikap untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
3. Pelatihan diartikan sebagai kegiatan yang dirancang untuk mempersiapkan pegawai yang mengikuti pelatihan dengan

pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka saat ini.

Pelatihan adalah salah satu bentuk edukasi dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Berbagai langkah yang perlu diterapkan dalam pelatihan:

1. Pihak yang diberikan pelatihan harus termotivasi untuk mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan.
2. Pelatih harus belajar terlebih dahulu mengenai materi yang akan diberikannya saat pelatihan.
3. Proses pembelajaran harus dapat diterapkan dengan baik dengan pendekatan yang rasional.
4. Pelatihan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat dipraktikkan sehingga memudahkan yang dilatih memahami materi tersebut.
5. Berbagai bahan yang dipresentasikan harus memiliki arti yang komprehensif dan dapat memenuhi kebutuhan yang dilatih
6. Materi yang diajarkan harus memiliki arti yang lengkap bagi peserta pelatihan.

Pelatihan berbeda dengan konsep pendidikan, meskipun sering dikemukakan menjadi satu kesatuan menjadi “*Pendidikan dan Pelatihan atau DIKLAT*”. Sesungguhnya, kedua konsep tersebut terdapat perbedaan yang signifikan, meskipun didasari bahwa secara umum ada persamaan, yakni sama-sama mengembangkan kualitas SDM. Misalnya, bahwa pendidikan dan pelatihan dimaknai sebagai upaya untuk mengembangkan SDM, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan

kepribadian manusia. Penggunaan konsep pendidikan dan pelatihan dalam suatu institusi atau organisasi biasanya disatukan menjadi 'Diklat' atau pendidikan dan pelatihan.¹³

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia semakin meningkat menjadi masalah strategi utama karena berbagai alasan.

1. Perubahan yang cepat dalam teknologi berlanjut menyebabkan meningkatnya tingkat keausan keterampilan. Agar tetap kompetitif, organisasi perlu melanjutkan pelatihan bagi sumber daya manusianya dalam menggunakan teknologi terbaik dan muktahir yang tersedia. Mengelola lingkungan yang bergerak cepet atau *turbulent* seperti ini menciptakan kebutuhan pembelajaran berkelanjutan bagi manajer.
2. Desain ulang pekerjaan dalam pekerjaan yang mempunyai tanggungjawab lebih luas memerlukan sumber daya manusia memperkirakan lebih banyak tanggung jawab, melakukan inisiatif, dan pengembangan lebih lanjut keterampilan interpersonal untuk menjamin kinerja dan keberhasilan mereka. Sumber daya manusia perlu mendapatkan keterampilan lebih luas dan diberikan batuan dengan peluang pengebangan melalui kerja sama kelompok, kolaborasi, dan manajemen konflik.
3. Marger dan akuisisi telah mningkat dengan pesat. Altivitas ini mengintegrasikan sumber daya manusia dalam satu organisasi ke

¹³ Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan pertama, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hal. 168

dalam organisasi klainnya yang memepunya budaya sangat berbeda. Ketika hasil finansial dan kinerja dari aktivitas merger dan akuisisi lebih rendah dari rencana, biasanya alasanya terletak pada sistem sumber daya manusia daripada sistem manajemen operasional atau finansial.

4. Sumber daya manusia bergerak dari satu oemberi kerja ke pemberi kerja lainnya dengan frekuensi lebih besar daripada periode sebelumnya. Dengan loyalitas kebih rendah pada pemberi kerja tertentu dan lebih pada karier sumber daya manusia sendiri, lebih banyak waktu harus dikeluarkan dalam mengintegrasikan sumber daya manusia baru ke dalam tempat pekerjaan.
5. Globalisasi operasi bisnis memerlukan manajer mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan perbedaan bahsa dan budaya.¹⁴

2. Pentingnya Pelatihan

Beberapa organisasi, terutama para manajer memandang sosialisasi, latihan dan pengembangan, terlalu mahal dan terlalu panjang jangkanya. Selain argumentasi tersebut, tampaknya masalah besarnya biaya juga menjadi persoalan. Paradigma pelatihan haruslah diletakkan pada posisi yang benar sehingga akan memberikan manfaat yang optimal. Batas sempit memisahkan pelatihan dari belajar teknikbaru. Apabila keterampilan dan pengetahuan sudah menjadi karatan akan menghasilkan

¹⁴ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, edisi keempat, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 370

suatu lingkaran setan.. selain itu, efektivitas sistem pelatihan suatu organisasi membutuhkan dukungan dan kerja sama semua pegawai di dalam sistem. Dukungan manajemen puncak sangat penting, tetapi dukungan mereka saja tidaklah cukup dibutuhkan juga dukungan dan komitmen dari pimpinan menengah dan pimpinan tingkat bawah. Hal yang perlu juga diperhatikan adalah motif penyelenggaraan pelatihan. Pegawai terkadang memperoleh pelatihan karena alasan yang lain selain kebutuhan, seperti di beberapa organisasi telah menjadi agenda tahunan. Sementara itu, suatu organisasi memberikan imbalan kepada pegawai berprestasi berupa mengikuti pelatihan. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan pelatihan tersebut, tetapi difasilitasi organisasi untuk dilewatkan.¹⁵

D. Bantuan Operasional

1. Pengertian Bantuan

Bantuan disini dikatakan ialah berupa alat-alat berat ataupun kebutuhan untuk pengoperasian nelayan. Bantuan merupakan pemberian berupa uang atau barang dari pemerintah kemasyarakatan, keluarga kelompok atau masyarakat yang bersifat secara tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.¹⁶

Bantuan yang dapat di berikan berupa alat penangkapan ikan yang merupakan sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, alat bantu penangkapan

¹⁵ Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan pertama, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hal. 172

¹⁶ <https://brainly.co.id/tugas> diakses pada tanggal 17 september 2019

ikan yang selanjutnya disebut ABPI yang merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dan mendukung kegiatan penangkapan kapal sekaligus bantuan sarana penangkapan ikan yang merupakan bantuan berupa kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan dan alat penangkapan ikan yang diberikan oleh pemerintah kepada koperasi yang memiliki anggota nelayan yang bergabung dalam KUB. Pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk sarana penangkapan ikan tahun anggaran 2017 adalah satuan kerja direktorat kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang didukung oleh tim yang akan ditetapkan oleh direktorat jenderal perikanan tangkap dan kuasa pengguna anggaran. Bentuk bantuan penangkapan ikan di direktorat jenderal perikanan tangkap tahun anggaran 2017 diberikan dalam bentuk barang yang terdiri dari; 1) kapal penangkap ikan, 2) alat penangkap ikan, 3) mesin tanpa kapal perikanan dan 4) alat bantu penangkap ikan.

2. Persyaratan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan

a. Bantuan kapal penangkapan ikan

1. Kelembagaan

- a. Berbentuk koperasi primer
- b. Memiliki nomer induk koperasi
- c. Jenis koperasi
- d. Kelompok koperasi perikanan atau nelayan
- e. Sektor usaha koperasi bidang perikanan

- f. Koperasi yang belum menerima bantuan
 - 2. Pengurus dan keanggotaan
 - a. Pengurus atau anggota bersertifikat
 - b. Anggota koperasi berasal dari nelayan
 - 3. Kriteria usaha
 - a. usaha utama koperasi ialah usaha penangkapan ikan.
 - b. Yang sudah berbentuk koperasi atau KUB
 - c. Usaha lainnya yang mendukung penangkapan ikan
 - d. Memiliki nomor pokok wajib pajak
- b. Bantuan alat penangkapan ikan, mesin tanpa kapal perikanan dan ABPI
- 1. kriteria koperasi
 - a. koperasi memiliki induk, jenis koperasi produsen atau konsumen, kelompok perikanan atau nelayan, sektor usaha perikanan.
 - b. pengurus atau anggota dari nelayan minimal 20 orang
 - c. jenis usaha perikanan
 - 2. kriteria KUB
 - a. nelayan anggota KUB berjumlah sekurang-kurangnya 10 orang dan telah memiliki identitas kartu nelayan serta tercantum di dalam aplikasi SIM PUPI (modk KUB)
 - b. mengisi kelengkapan data profil KUB sebagaimana formulir pada aplikasi SIM PUPI

- c. terdaftar di aplikasi SIM PUPI
 - d. mnendapat rekomendasi dinas
 - e. berstatus sekurang-kurangnya kelas pemula
3. kriteria perorangan/nelayan
- a. memiliki kapal berukuran sampai 10 GT
 - b. memiliki kartu nelayan
 - c.tergabung dalam KUB
 - d. membuat surat pernyataan sanggup mengoperasikan
 - e. mendapat rekomendasi dinas¹⁷

E. Dinas Perikanan

1. Pengertian Perikanan

Dalam konteks legal, Indonesia mengartikan perikanan melalui pengertian yang doituangkan dalam aturan perundang-undangan dalam UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang diubah dalam UU No 45/2009 mendefinisikan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Dalam konteks secara ilmiah, mengartikan perikanan sebagai sustu sistem yang terdiri dari tiga komponen yakni biota perairan, habitat biota dan manusia sebagai pengguna sumber daya tersebut. Setiap komponen tersebut akan memengaruhi perfoma perikanan. lebih jauh Lankey dalam Fuzi

¹⁷ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, <http://kkp.go.id> diakses pada tanggal 16 september 2019

membagi perikanan ke dalam berbagai kelompok atau tipe berdasarkan beberapa sifat antara lain:

- a. Jenis lingkungan: contoh, perikanan air tawar, danau, laut, sungai dan bendungan
- b. Metode pemanenan: contoh, perikanan *trawl*, *purse seine*, *dip ner*, dan sebagainya
- c. Jenis akses yang diizinkan: contoh, perikanan akses terbuka (*open acces*), perikanan *open acces* dengan regulasi, perikanan dengan akses terbatas.
- d. *Concern organisme*, contoh: perikanan salmon, udang, tuna, kepiting.
- e. Berdasarkan tujuan penangkapan: perikanan komersial, subsistem, perikanan rekreasi.
- f. Derajat kealamaan dari hewan target: total dari alam, semi budidaya, atau total budidaya.

Usaha perikanan dapat dipandang sebagai suatu perpaduan faktor produksi, atau sebagai suatu barang antara yang dihasilkan faktor-faktor produksi “klasik” tenaga kerja dan barang modal atau apapun yang dianggap jenis ini.¹⁸

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan

Dinas Perikanan sebagai pelaksana pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Tulungagung memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 58 Tahun 2016

¹⁸ Lina Asmara Wati dan Mimit Primyastanto, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern*, (Malang: UB Press, 2018), hal. 19

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung. Tugas Dinas Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

1. Tugas Pokok Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung memiliki tugas pokok yaitu untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

2. Fungsi Dinas Perikanan

Adapun beberapa fungsi dari Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

- 1). Perumusan kebijakan bidang perikanan
- 2). Pelaksanaan kebijakan bidang perikanan
- 3). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perikanan
- 4). Pelaksanaan administrasi dinas
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.¹⁹

¹⁹ Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, <http://dkp.tulungagung.go.id/index.php/profil> diakses pada tanggal 20 Juli 2019

Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung juga mempunyai program dalam menjalankan tugas bukan hanya tugas umum yang dilaksanakan. Yaitu sebagai berikut:

- a. Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan serta penyediaan fasilitas dan jasa sektor kelautan dan perikanan.
- b. Pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengeloh serta pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- c. Konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- d. Pembinaan, bimbingan dan pendampingan program guna pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis kerakyatan.²⁰

F. Meningkatkan Ekonomi

Istilah peningkatan diambil dari kata dasar tingkat makna kata peningkatan itu sendiri adalah proses, pembuatan, cara meningkatkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Kata pembelajaran sendiri diambil dari kata belajar. Belajar bukan hanya mengingat tetapi lebih dari itu yaitu mengalami, dan belajar adalah suatu perubahan yang relatif permanen dalam suatu kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari suatu praktik atau latihan. Dengan demikian peningkatan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat proses mentransfer ilmu

²⁰ Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung, Program Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung Tahun 2017, <http://dkp.tulungagung.go.id/index.php/profil> diakses pada tanggal 20 Juli 2019

melalui kegiatan yang menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar terjadi perubahan tingkah laku yang relatif permanen.²¹

Sejak awal peradaban manusia, masyarakat baik secara individual maupun kelompok memiliki peranan penting dalam perekonomian. Kesejahteraan ekonomi berhasil dicapai oleh masyarakat adalah merupakan hasil kerja kolektif dari semua komponen dalam masyarakat tersebut. Pada dasarnya peran masyarakat ini merefleksikan kepedulian mereka terhadap sesama. Mereka berekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, tetapi juga untuk kepentingan orang lain, misalnya keluarga, kerabat, dan masyarakat disekitarnya. Terdapat berbagai motivasi tentang mengapa seseorang rela berkorban untuk kepentingan orang lain atau disebut altruisme, meskipun tanpa mendapatkan imbalan atau keuntungan secara langsung.

Salah satu motivasi adalah karena seseorang menyadari bahwa hidupnya akan selalu membutuhkan orang lain. masyarakat nelayan dalam hal ini bukan hanya mereka yang dalam mengatur hidup dan kehidupannya hanya bertarung-berperang melawan benturan-benturan badai siang dan malam hari, hanya sekedar mencari sesuap yang bisa menghidupi keluarganya. Mengingat manusia hidup ditengah-tengah masyarakat bukan hidup ditengah hutan yang mana faktor lingkungan besar sekali pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam masyarakat. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia nelayan merupakan jawaban atas sebagian persoalan di sektor penangkapan. Fokus pada aspek ini didasari oleh pertimbangan pemikiran sebagai berikut.

²¹ <http://sigilib.unila.ac.id> diakses pada tanggal 21 juli 2019

Pertama, aspek sumberdaya manusia merupakan unsur terpenting dari sebuah organisasi ekonomi. Aspek ini menjadi penentu keberhasilan dan kegagalan dari sebuah kegiatan ekonomi. Kedua, nelayan adalah berposisi sebagai produsen hasil laut. Keberhasilan usaha nelayan akan menentukan secara signifikan aktivitas ekonomi disektor pengolahan, pemasaran, karena itu jika musim barat tyiba (Desember-Februari) dan nelayan tidak melaut, maka hasil tangkapan menurun drastis, sehingga aktivitas ekonomi disektor pengolahan dan pemasaran juga menjadi lumpuh. Dalam kondisi demikian, sebagian besar masyarakat pesisir akan kehilangan pendapatan. Ketiga, sebagai pelaku usaha, nelayan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem sumberdaya laut. Kerusakan ekosistem akan berpengaruh besar terhadap penurunan hasil tangkapan. Karena itu, harus dihindari kegiatan penangkapan yang merusak ekosistem. Tugas dan tanggung jawab sosial-ekonomi nelayan sangat berat dan sekaligus mulia, karena ia menjadi pinjamin kelangsungan hidup keluarganya dan masyarakat.

Untuk mengubah pandangan terhadap masyarakat pedesaan, masyarakat petani dan nelayan, perlu mengubah kehidupan mereka, yaitu dengan pendekatan pembangunan ekonomi yang dimulai dari desa. Para nelayan di Philipina, khususnya di General Santos adalah para nelayan yang kaya raya. Hal ini dikarenakan pemerintah philipin sekitar tahun 1990-an, telah memberikan perhatian kepada kaum nelayan, dengan memberikan bantuan pendanaan usaha perikanan dan pertanian di daerah tersebut. Sehingga usaha perikanan dan pertanian di General Santor telah mengalami

kemajuan yang sangat pesat. Bahkan mereka telah meraup keuntungan besar dengan melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Sementara masyarakat nelayan kita masih jauh tertinggal, karena alat penangkapan serta sarana pendukung dan pengetahuan serta skill penangkapan yang jauh tertinggal dibanding dengan nelayan Philipin. Kalau kita berlayar dari Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sangihe ke General Santor hanya ditempu dalam waktu 12 jam, atau 1 jam ditempu dengan penerbangan dari Manado. Tetapi akan tampak perbedaan yang begitu menonjol pembangunan di Kota Davao dan General Santos dibanding dengan Kota Manado, apalagi pembangunan di kabupaten Talaud dan Sangir yang bertetangga dengan Davao dan General Santos. Sumber pendapatan masyarakat di kedua wilayah perbatasan tersebut sesungguhnya sama, yaitu dari Perikanan dan Pertanian. Namun kehidupan ekonomi di dua wilayah yang berdekatan ini sangat jauh berbeda. Ini hanya salah satu contoh saja namun dapat menunjukkan kepada kita betapa kehidupan masyarakat petani dan nelayan di penghujung Indonesia dan penghujung Philipin terlihat begitu berbeda.

Pemerintah perlu mencari suatu pendekatan yang tepat dan dituangkan dalam sebuah konsep yang mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat di pedesaan. Pendekatan pembangunan ekonomi yang mulai dari pedesaan, dengan memadukan budaya masyarakat yang ada di pedesaan, kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang perlu kita kemas kembali dipadukan dengan konsep ekonomi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut Indonesia dari sudut pandang pembangunan

berkelanjutan (sustainable development) dihadapkan pada posisi yang tidak mendua, atau berada di persimpangan jalan. Disatu pihak, ada beberapa kawasan pesisir yang telah dimanfaatkan (dikembangkan) dengan intensif. Akibatnya, indikasi telah terlampauinya daya dukung atau kapasitas berkelanjutan (potensi lestari) dari ekosistem pesisir atau kelautan, seperti pencemaran, tangkap lebih (over fishing), degradasi fisik habitat pesisir, dan abrasi pantai, telah muncul di kawasan-kawasan pesisir termaksud. Fenomena ini telah dan masih berlangsung, terutama di kawasan-kawasan pesisir padat penduduknya, dan tinggi tingkat pembangunannya, seperti Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Bali, dan Sulawesi Selatan.

Apabila kita cermati keadaan yang terjadi di sekitar lingkungan kita, masyarakat kecil atau masyarakat kelas bawah ternyata bukanlah masyarakat yang secara keseluruhan hanya mampu menggantungkan kehidupannya pada pihak lain, dalam hal ini terutama pada pemerintah. Mereka juga bukan seluruhnya dapat dikatakan akan menjadi beban pembangunan bangsa. Kenapa bisa dikatakan seperti itu, bukan lain karena diantara mereka juga pada dasarnya tumbuh semangat untuk mandiri dan lepas dari ketergantungan pada pihak lain. Makanya tidak seluruhnya benar ungkapan yang mengatakan bahwa penyebab keterpurukan ekonomi bangsa ini adalah karena adanya ketidakmampuan untuk menumbuhkan modal (capital). Wilayah pesisir dan lautan Indonesia juga memiliki berbagai macam jasa lingkungan yang sangat potensial bagi kepentingan pembangunan dan bahkan kelangsungan hidup manusia. Jasa-jasa lingkungan yang dimaksud meliputi fungsi kawasan pesisir

dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim (climate regulato), kawasan perlindungan (konservasi dan preservasi), dan sistem penunjan kehidupan serta fungsi ekologis lainnya. Kalau kita jabarkan secara singkat dan sederhana, peran apa saja yang dilakukan masyarakat dalam berpartisipasi dibidang ekonomi adalah dimana sebagian besar masyarakat Indonesia adalah Nelayan. Selain itu, penguatan dan pembinaan sumberdaya manusia pesisir juga menjadi factor yang menentukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sumberdaya pesisir bagi mereka yang kemudian diaktualisasikan dalam upaya-upaya pemanfaatan sehari-hari singga sumberdaya tersebut tetap lestari.

Dalam kerangka penguatan dan pembinaan faktor-faktor penentu dalam pembinaan masyarakat meliputi, Pembinaan Manusia, Pembinaan Lingkungan, Pembinaan Sumberdaya dan Pembinaan Usaha. Pembinaan manusia adalah strategi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat kecil melalui pengembangan SDM. Strategi ini meliputi:

1. Investasi pada modal manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
2. Peningkatan kapasitas organisasi dan kelompok baik formal maupun informal.
3. Memperluas dan mengintegrasikan mandat organisasi dan kelompok sehingga efisiensi dapat tercapai.
4. Memperbaiki budaya/etos kerja.

5. Menghilangkan sifat dan mental negatif yang memasung produktivitas dan menghambat pembangunan.

Pembinaan lingkungan merupakan strategi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pesisir melalui perbaikan lingkungan tinggal, lingkungan dan prasarana produksi serta meningkatkan peran masyarakat dalam menata dan mengelola lingkungan hidupnya. Strategi ini mencakup hal-hal berikut:

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola dan menata lingkungan hidup, baik tempat tinggal mereka maupun habitat atau kawasan tempat kegiatan ekonomi produktif dijalankan.
- b. Membangun infrastruktur terutama yang menyangkut dengan kebutuhankebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.
- c. Meningkatkan perencanaan dan pembangunan secara spasial di wilayah pesisir dengan mempertimbangkan komptabilitas wilayah pesisir dan dayadukungnya.
- d. Mengenal sumberdaya serta faktor yang mempengaruhi eksistensinya.
- e. Memperkaya sumberdaya melalui kegiatan pengkayaan stok ikan dan habitatnya, rehabilitasi, mitigasi bencana, dan mengendalikan pencemaran.

Pembinaan usaha meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap permodalan yang dapat ditempuh melalui hubungan langsung antara masyarakat dengan sumber modal, hubungan secara kelompok antara

masyarakat dengan sumber modal dengan atau tanpa jaminan dari pihak ketiga, hubungan antara pengusaha skala kecil secara individu atau secara kelompok dengan pengusaha skala besar atau BUMN, serta penyatuan kekuatan modal dimiliki rakyat kecil secara individu. Bina usaha meliputi strategi: 1) Meningkatkan ketrampilan usaha, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi. 2) Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap teknologi, modal, pasar, dan informasi pembangunan. 3) Membangun kemitraan mutualistik diantara sesama pelaku ekonomi rakyat dan melalui kerjasama perusahaan skala besar. 4) Membangun sistem insentif administrasi serta pendanaan formal dan informal. 5) Menyediakan peraturan perundangan yang menjamin berjalannya proses pengentasan kemiskinan.²²

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran pustaka yang berupa hasil penelitian, karya ilmiah atau sumber lain yang digunakan penelitian sebagai pembandingan terhadap peneliti yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, peneliti menemukan karya ilmiah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. pembahasan yang diberikan seperti pemberdayaan yang mengacu pada kesejahteraan, peningkatan ekonomi, perkembangan masyarakatnya, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Wulandari dengan judul “Kajian Tingkat Kesejahteraan Nelayan Kecil di Kelurahan Donan Kecamatan

²² Nurfadilah T, 2016, “*Peranan Masyarakat Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomi di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewalimandar*”, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap” pada hasil penelitian ini ditujukan untuk melihat peningkatan kesejahteraan nelayan. Dalam hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil berupa tingkat kesejahteraan yang seperti dulu lebih tinggi dibandingkan saat ini.²³

Penelitian yang dilakukan Oleh Nurfadhilah dengan judul “Peranan Masyarakat Nelayan terhadap Peningkatan Ekonomi di Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Powewali Mandar” pada hasil penelitian ini diketahui peran masyarakat nelayan juga penting dan berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, masyarakat nelayan di desa kenje, masyarakat nelayan mewujudkan sumber daya manusia dibuktikan dengan adanya keterampilan usaha yang dilakukan oleh para istri-istri nelayan, serta ketertiban dalam pembangunan infrastruktur yang ada melalui pemberian dana. Dalam penelitian ini nelayan belum bisa maksimal berperan dalam mensejahterakan nelayan itu sendiri karena mereka hanya nelayan pinggiran yang penghasilannya untuk kebutuhan primer,sekolah dan para istri mereka hanya bekerja dengan upah yang minim.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Nurhayati Qodriyatun “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kota Batam melalui Pemberdayaan Masyarakat”. Pada hasil penelitian diketahui tujuan dari

²³ Wahyu Wulandari, 2016, “ *Kajian Tingkat Kesejahteraan Nelayan Kecil di Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap*”, Skripsi Jurusan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, <http://repository.ump.ac.id> diakses pada tanggal 22 juli 2019

²⁴ Nurfadhilah T, 2016, “*Peranan Masyarakat Nelayan Terhadap Peningkatan Ekonomidi Desa Kenje Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewalimandar*”, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar

pemberdayaan masyarakat ialah untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan ekonomi nelayan tersebut. Dalam hasil penelitian terdapat hal yang tidak baik yaitu adanya ketidak maksimalan dalam pemberdayaan yang ada karena rata-rata nelayan dalam penelitian ini ialah nelayan buruh yang tidak memiliki kapal ataupun alat sendiri adanya pembangunan infrastruktur pun tidak menjadi hal yang bermanfaat bagi nelayan dan tidak bisa dinikmati oleh nelayan kecil. Pemberdayaan nelayan disini, sekaligus nelayan yang cenderung enggan dalam pemberdayaan dan takut akan hal yang diberikan membuat nelayan sulit berkembang.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Ipah Ema Jumiati “Inovasi Pemberdayaan Nelayan (Studi Kasus Perubahan Kelembagaan Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangan Kota Serang)”. Pada hasil penelitian diketahui tentang penejelasan pemberdayaan, bagaimana pemberdayaan, hambatan ataupun hasil dari pemberdayaan itu sendiri. Dalam hal proses pelaksanaan kebijakan, bahwa predikat miskin yang disandang nelayan dilihat dari berbagai perspektif karena itu akan menentukan mengapa banyak pihak, dalam hal ini pemerintah cenderung melekatkan kategori tersebut pada mata pencaharian nelayan pemcapaian program baru erup diterimanya bantuan uang tunai ke penerima program, belum kepada yang lebih luas jauh ke depan.²⁶

²⁵ Sri Nurhayatin Qodriyatun, 2013, “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kota Batam melalui Pemberdayaan Masyarakat”, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi Sekretariat Jenderal

²⁶ Ipah Ema Jumiati, 2016, “Inovasi Pemberdayaan Nelayan (Studi Kasus Perubahan Kelembagaan Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Pelabuhan

Penelitian yang dilakukan oleh Dahlan Tampubolon “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti”. Pada hasil penelitian diketahui bagaimana strategi yang dapat berpengaruh besar dalam beberapa aspek penunjang ekonomi nelayan. Dalam penelitian ini pertumbuhan penduduk usia produktif yang relatif tinggi, di mana penduduknya sebagian besar bermukim di pedesaan dan wilayah pesisir. Masyarakat bergantung pada sektor perikanan, masyarakat disini diberikan pengarahan berupa berwirausaha yang didorong dengan kebutuhan dan biaya hidup yang semakin tinggi. semangat dan minat berwirausaha ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha mikro kecil dan menengah.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Andhika Rakhmanda dkk “Peran Kelompok Nelayan dalam Perkembangan Perikanan di Pantai Sadeng Kabupaten Gunungkidul”. Pada hasil penelitian diketahui ialah nelayan yang dapat bantuan pemerintah banyak yang didapat dari pembentukan kelompok nelayan agar lebih merata dalam tujuannya. Secara umum kelompok nelayan telah menjalankan perannya sebagai kelas belajar dan wahana kerjasama dengan cukup baik dan sebagai unit usaha nilai kurang baik, keberadaan kelompok berimplikasi pada meningkatnya, pengetahuan keterampilan akses terhadap sumber-sumber produktif dan informasi terkait modal, pasar,

Perikanan Nusantara (PPN) Karang Kota Serang”, Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP, universitas SULTAN Ageng Tritayasa Serang Banten.

²⁷ Dahlan Tampolin, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti*, Jurnal (Pekanbaru: Universitas Riau, Vol 8 No 2)

teknologi ataupun jaringan bagi anggota. kemampuan nelayan mengorganisasikan diri pada taraf tertentu menunjukkan karakter kemandirian dan keswadayaan komunitas nelayan.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Marindi Briska Yusni dan Eko Budi Santoso berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan subsektor perikanan tangkap di pesisir Kabupaten Tulungagung dengan konsep pengembangan ekonomi lokal. Penelitian ini memiliki faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada sektor perikanan di Tulungagung yaitu (1) faktor klaster terdiri dari masyarakat, pemerintah, dan para swasta. (2) faktor manfaat ekonomi terdiri dari pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. (3) faktor sumber daya manusia terdiri dari tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja. (4) faktor sumber daya lokal terdiri dari bahan baku, ketersediaan bahan baku dan perolehan bahan baku. (5) faktor pemasaran terdiri dari strategi pemasaran dan permintaan pasar. (6) faktor teknologi perikanan terdiri dari alat tangkap perikanan dan teknologi pengolahan. (7) faktor proses produksi terdiri dari jumlah produksi, hasil produksi dan biaya produksi. (8) faktor modal terdiri dari ketersediaan modal dan sumber modal. (9) faktor sarana prasarana terdiri dari TPI PPI, aksesibilitas, listrik dan air bersih. (10) faktor pengolahan terdiri dari lokasi pengolahan perikanan tangkap dan proses pengolahan perikanan tangkap. Dari faktor yang ada bahwa untuk melakukan pengembangan subsektor perikanan tangkap di pesisir selatan Kabupaten

²⁸ Andhika Rakhmanda dkk, *Peran Kelompok Nelayan dalam PERKEMBANGAN Perikanan di Pantai Sadeng Kabupaten Gunungkidul*, Jurnal (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018, Vol. 6 No. 2)

Tulungagung dengan menggunakan konsep PEL perlu memperhatikan 10 (sepuluh) faktor, antara lain: faktor klaster, faktor manfaat ekonomi, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya lokal, faktor pemasaran, faktor teknologi perikanan, faktor proses produksi, faktor modal, faktor sarana prasarana, dan faktor pengolahan. Adapun beberapa faktor yang masih memiliki permasalahan pengembangan perikanan tangkap antara lain faktor klaster, faktor pemasaran, faktor pengolahan, dan faktor sumber daya manusia.²⁹

Persamaan dalam penelitian ini ialah adanya pemberdayaan masyarakat nelayan yang mengacu pada peningkatan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat nelayan melalui bantuan yang ada seperti bantuan alat tangkap dan pelatihan yang ditujukan untuk perkembangan nelayan dalam menjalankan kegiatan penunjang ekonomi.

Perbedaan yang ada dalam penelitian ini ialah fokus penelitian yang tidak sama. Mereka lebih condong dalam menangani kesejahteraan dan kemiskinan dalam pemberdayaan yang dilakukan. Perbedaan inilah yang menjadi acuan penelitian ini ialah membahas hal yang belum signifikan dalam beberapa penelitian yang sudah ada.

²⁹ Marindi Briska Yusni dan Eko Budi Santoso, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Subsektor Perikanan Tangkap di Pesisir Selatan Kabupaten Tulungagung dengan Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jurnal Teknik (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), 2017, Vol. 6 No. 2)